

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. Dan pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi atau sumbangan yang sangat penting, karena meliputi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki penghasilan diatas PTKP yang dikeluarkan oleh pemerintah.

PPH atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor / honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan, untuk menghitung PPH bisa digunakan metode *Net Method* dan *Gross UP Method*.

Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sekitar 128 Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 9 orang pegawai golongan IV, 79 orang pegawai golongan III, 39 orang Pegawai golongan II dan 1 Orang pegawai golongan I.

Pegawai di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki pendapatan berbeda dari segi gaji pokok, tunjangan, potongan bpjs dan penghasilan tambahan lainnya, penghasilan yang diterima oleh pegawai DPRD Provinsi Sumatera Utara tentunya harus dipotong pajak, untuk proses pemotongan pajak bisa ditentukan dengan dua buah metode yaitu menggunakan *Net Method* dan *Gross UP Method* dimana masing-masing metode akan mempengaruhi penghasilan pegawai.

Metode pemotongan Pajak *Net Method* adalah PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan akan menanggung semua PPh Pasal 21 atas karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan, apabila dilakukan koreksi fiskal akan dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat *nondeductable expenses* menjadikan PPh perusahaan lebih besar. Sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan. Sedangkan *Gross-Up Method* adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (*deductable expenses*) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto, *take home pay* sama dengan *net method*, dan kewajiban pajak terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dibuat perbandingan *Net method* dan *Gross Up* pada pajak pph 21 untuk mengetahui perhitungan pemotongan pajak

pada instansi dengan kedua metode tersebut, maka penulis mengangkat judul **“Penerapan Perbandingan *Net Method* dan *Gross UP* Pada Pajak PPH 21 atas Karyawan atau Pegawai Tetap (Studi Kasus Sekretariat DPRD ProvSU)”**.

## **I.2. Ruang Lingkup Permasalahan**

Adapun Ruang Lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam membangun sistem informasi ini, diperhatikan terlebih dahulu permasalahan - permasalahan yang timbul saat suatu proses kelola data dikerjakan tanpa bantuan suatu sistem informasi.

Pada proses pengidentifikasian masalah dengan apa yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada diantaranya :

1. Pemotongan pajak sering menjadi kendala setiap bulannya dan selalu berubah-ubah bagi pegawai Sekretariat DPRD ProvSU.
2. Potongan gaji atas pajak akan berbeda jika menggunakan metode dan metode mana yang paling kecil atas potongan pajak belum diketahui.

### **I.2.2. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dari latar belakang dan identifikasi masalahnya adalah bagaimana merancang sebuah sistem aplikasi perhitungan pajak PPH 21 pegawai tetap Sekretariat DPRD ProvSU dengan menerapkan *Net Method* dan *Gross UP* sebagai proses perhitungan pajak.

### **I.2.3. Batasan Masalah**

Atas pertimbangan waktu dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis melakukan pembatasan masalah hanya :

1. Penggunaan metode *Net Method* dan *Gross UP* dikondisikan pada objek pajak yaitu gaji pokok pegawai tetap tanpa ditambah tunjangan
2. Input yang digunakan adalah data Jabatan, data Pegawai, data Golongan dan data Pemotongan Pajak Pegawai
3. Output yang diharapkan adalah laporan jabatan, laporan pegawai, laporan golongan, laporan Pemotongan Pajak Pegawai, daftar pajak pegawai tetap.
4. Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah *Visual Basic 2010* dan *SQL Server 2008*
5. Metode yang dibandingkan adalah *Net Method* dan *Gross UP*.
6. Pemodelan sistem yang digunakan adalah *Unified Modelling Language*.

### **I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **I.3.1 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan salah satu aplikasi yang bisa dijadikan standar perhitungan pajak gaji pegawai
2. Membangun sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan sistem perhitungan pajak.

3. Memberikan informasi perbandingan *net method* dan *gross up method* pada proses perhitungan pajak PPH 21.

### **I.3.2 Manfaat**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah

1. Menambah perbendaharaan aplikasi mengenai perhitungan pajak terutama pajak penghasilan perorangan
2. Menjadikan salah satu referensi untuk pembuatan topik sejenis.

### **I.4. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang sistematis untuk mengerjakan suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan beberapa cara untuk memperolehnya, diantaranya :

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan dengan mempelajari teori dasar yang mendukung penelitian, pencarian dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka penulis memakai teknik :

- a. Pengamatan Langsung (*Observation*)

Melakukan pengamatan secara langsung ke tempat objek pembahasan yang ingin diperoleh yaitu bagian-bagian terpenting dalam pengambilan data yang diperlukan berkaitan tentang pada pajak PPH 21 atas karyawan atau pegawai tetap pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

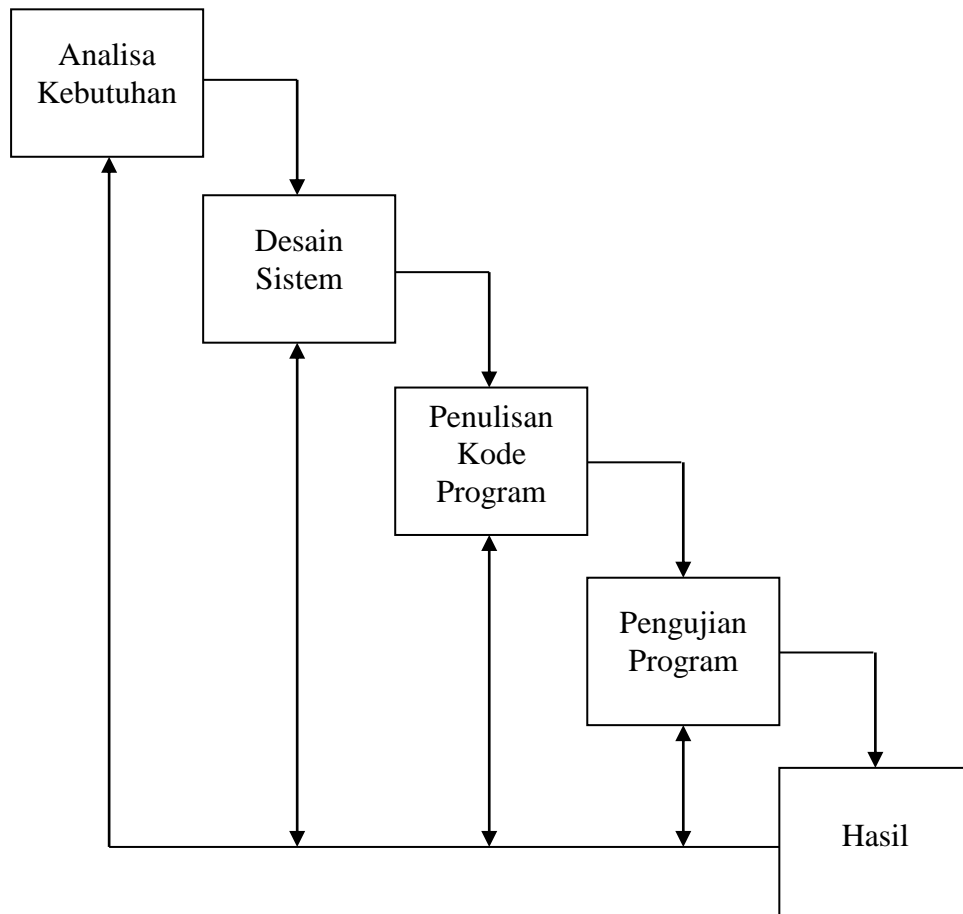
b. Wawancara (*Interview*)

Teknik ini secara langsung bertatap muka dengan bidang kemahasiswaan untuk mendapatkan penjelasan dari masalah-masalah yang sebelumnya kurang jelas yaitu tentang mekanisme sistem yang digunakan pada perusahaan dan juga untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh dikumpulkan benar-benar akurat.

2. Penelitian perpustakaan (*Library Research*)

Pada metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan skripsi yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku-buku yang tersedia diperpustakaan, yang berhubungan dengan penulisan Laporan Skripsi ini.

Penelitian ini akan melalui beberapa tahapan. Tahapan dalam penelitian ini dapat di modelkan pada diagram *waterfall*. Adapun beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar I.1. Diagram *Waterfall* Penerapan Perbandingan *Net Method* dan *Gross UP* Pada Pajak PPH 21 atas Karyawan atau Pegawai Tetap (Studi Kasus Sekretariat DPRD Provsu)**

Keterangan :

### 1. Analisa Kebutuhan

Pada tahapan ini merupakan analisa terhadap kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data gaji pada pajak pph 21 atas karyawan atau pegawai tetap

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Adapun analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel Analisa Kebutuhan.

**Tabel I.1. Analisa Kebutuhan**

No.	Perangkat Keras/ Hardware	Perangkat Lunak/ Software
1.	<i>Laptop/ Pc</i>	Sistem Operasi <i>Windows</i>
2.	<i>Keyboard</i>	<i>Visual Basic 2010</i>
3.	<i>Mouse</i>	<i>SQL Server 2008</i>

## **2. Desain Sistem**

Pada tahapan ini akan dilakukan rancangan desain sistem hingga implementasi desain sistem sesuai dengan hasil analisa yang telah dikumpulkan. Perancangan desain sistem ini menggunakan pemodelan *Unified Modelling Language (UML)*. Kemudian desain sistem disesuaikan dengan perancangan awal.

## **3. Penulisan Kode Program**

Kode program merupakan terjemahan *design* dalam bahasa yang bisa dikenali komputer. Pada tahap ini desain sistem diimplementasikan ke dalam kode program. Pemrograman dimulai dengan bahasa pemrograman *Visual Basic 2010* dan *database SQL Server 2008*. Dimana *user* akan menginputkan data gaji pegawai pada pajak PPH 21.

## **4. Pengujian Program**

Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan pengujian terhadap program yang dibuat. Tujuan pengujian program adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian akan diperbaiki. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan metode *black box* dan *white box*. Dimana cara pengujian ini adalah dengan melakukan percobaan objek program secara bertahap.

Apabila proses sistem ini tidak berjalan dengan baik maka akan diperbaiki dan diteliti kembali dimana letak kekurangannya dan kemudian dilakukan pengujian kembali agar program yang dibuat tidak memiliki kekurangan sistem lagi.

## 5. Hasil

Pada tahapan ini proses pembuatan perangkat lunak telah selesai sesuai dengan yang diharapkan. Perangkat lunak yang telah selesai perlu diadakan perawatan sistem untuk menjaga kualitas perangkat lunak dan perlu adanya *update* pada perangkat lunak yang telah dibuat agar perangkat lunak sesuai dengan kondisi baru.

### I.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk melakukan perbandingan penelitian.

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

**Tabel I.2. Keaslian Penelitian**

No	Nama / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Hafidhatun Dian Partiw 2014	Analisis Penerapan Metode <i>Gross-Up</i> Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Kantor PDAM Kabupaten Kebumen	Pada <i>gross-up method</i> , perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. Tunjangan Rp 10.550.600,00 bersifat taxable, menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan total gaji brutonya, gaji yang dibawa pulang berjumlah sama dengan

			<p>apabila menggunakan metode <i>net</i>, dan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat <i>deductable expenses</i>, tidak dikoreksi secara fiskal positif, mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu, metode ini adil untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan atas penerapan metode <i>gross-up</i>.</p>
2.	Devi Gustia 2014	Analisis PPH Pasal 21 Dengan Metode <i>Gross Up</i> Sebagai Alternatif Dan Rekonsiliasi Fiskal.	<p>Dalam hal ini peneliti memberikan perhitungan analisa biaya yang akan dikeluarkan sebelum tunjangan kesehatan diberikan, sesudah tunjangan kesehatan diberikan dengan metode <i>Gross Up</i> terhadap pajak terutang karyawan dengan asumsi jumlah karyawan tetap sejumlah 15 orang dan karyawan outsourcing sebanyak 15 orang. Asumsi lain adalah tunjangan kesehatan setiap karyawan diberikan tunjangan sebesar Rp. 600.000 setiap tahunnya. Untuk melakukan perhitungan PPh karyawan dengan menggunakan Metode <i>Gross Up</i>, maka harus ditentukan dahulu penghasilan kena pajak dari masing-masing karyawan berdasarkan UU No. 36 tahun 2008. Karena dalam perhitungan mulai tahun 2009 digunakan formulasi <i>Gross Up</i> PPh Pasal 21 yang terbagi menjadi 4 lapisan serta sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (Tarif Progresif) UU No. 36 Tahun 2008.</p>
3.	Rizky V.D.P Vridag 2015	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode <i>Net Basis</i> Dan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	<p>Dengan menggunakan metode <i>Net Basis</i> karyawan memang mendapatkan kenikmatan berupa tanggungan Pajak PPh 21 yang di tanggung perusahaan, namun karena Biaya PPh 21 tersebut tidak di</p>

		(PPh PASAL 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. REMENIA SATORI TEPAS MANADO	biayakan ( <i>nondeductable expenses</i> ) maka PPh Badan perusahaan akan bertambah dengan adanya koreksi Fiskal secara positif. Dengan penggunaan Metode <i>Gross Up</i> perusahaan akan memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 bagi karyawan. Karyawan akan menerima THP tanpa di kurangi dan di potong PPh 21 karena sudah di tanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak sebesar Rp. 418.943. Selain itu beban pajak yang akan di tanggung perusahaan tidak akan di koreksi Fiskal karena Beban PPh 21 tersebut telah di biayakan karena sifatnya <i>Deductable Expenses</i> . Di bandingkan Metode <i>Net</i> , Perhitungan dengan menggunakan Metode <i>Gross up</i> lebih memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun pihak Perusahaan.
4.	Fika Rahma Sari  2016	Penerapan Perbandingan <i>Net Method</i> dan <i>Gross UP</i> Pada Pajak PPH 21 atas Karyawan atau Pegawai Tetap (Studi Kasus Sekretariat DPRD ProvSU).	Pada penelitian ini penulis melakukan penerapan perbandingan <i>net method</i> dan <i>gross up</i> pada pajak pph 21 atas karyawan atau pegawai tetap. Penelitian ini akan diharapkan mana metode yang sesuai dan terbaik untuk menghitung pajak pegawai Sekretariat DPRD ProvSU.

### I.6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat riset penulis yaitu pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 5 MEDAN 20112.

## **I.7. Sistematika Penulisan**

Langkah - langkah ataupun tahapan yang ditempuh dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang Latar belakang ruang lingkup permasalahan, Tujuan dan Manfaat, Metodologi Penelitian, Lokasi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan program yang dirancang seperti pengertian sistem informasi, alat bantu perancangan sistem, database dan bahasa pemrograman yang digunakan.

### **BAB III : ANALISA DAN DESAIN SISTEM**

Bab ini mengemukakan tentang analisa sistem yang sedang berjalan, evaluasi sistem yang sedang berjalan dan desain sistem yang diusulkan.

### **BAB IV : HASIL DAN UJI COBA**

Bab ini menjelaskan tentang tampilan hasil implementasi sistem yang diusulkan, pembahasan hasil uji coba sistem, serta kelebihan dan kekurangan sistem yang dirancang.

**BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan penulisan dan saran dari penulis sebagai referensi perbaikan dimasa yang akan datang.